

**ANALISIS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TIM TEKNIS
PERIZINAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PEMASANGAN IZIN REKLAME
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan
Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

OLEH

**ALVIRA LESMI
NPM 0646021008**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2010**

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, T. Handoko. 2001. *Manajemen Edisi 2*. BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1992. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung. Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1982. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid 2*. CV. Haji Masagung. Jakarta.
- Moleong, J.Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Manullang, M. 1992. *Dasar-dasar Manajemen*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Miles, Mettew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.
- Nazir, Mohamad. 1998. *Metode Penelitian*. Graha Indonesia, Jakarta
- Nawawi, Hadari. 1995. *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 1992. *Dasar-dasar Manajemen Edisi 5*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 1999. *Manajemen Pemerintahan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Situnorang, M. Victor dan Juhir, Jusuf. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Siagian, P Sondang. 1990. *Filsafat Administrasi*. PT Gunung Agung. Jakarta Pusat.

Sujatno. 1992. *Manajemen Partisipasi*. Bumi Aksara. Jakarta.

Solihin, Dadang dan Marhayudi, Putut. 2002. *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*. Penerbit ISMEE. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, *tentang Paket Kebijakan Investasi*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, *tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, *tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 *tentang Tata Cara Perizinan Reklame*

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 *tentang Pajak Reklame*

Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 *tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung*

Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Reklame*

Keputusan Walikota Nomor 214/20/HK/2008 *tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Kota Bandar Lampung*

Keputusan Walikota Nomor 215/20/HK/2008 *tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Perizinan Kota Bandar Lampung*